

ABSTRAK

PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA PIDANA

Rakhbir Singh (2310623054), Supardi, Handoyo Prasetyo

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membedakan suku atau bangsa, dan semua orang diperlakukan setara di hadapan persidangan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Tersangka atau Terdakwa tidak lagi sebagai “Obyek” tetapi “Subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum. Adanya kenyataan masih banyaknya tersangka/terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pidana, menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa ketentuan KUHAP tidak dipatuhi. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan pengaturan KUHAP terkait kewajiban pendampingan tersangka/terdakwa dalam proses pengadilan & untuk menganalisis dan menguraikan aturan yang seharusnya terhadap penerapan kewajiban pendampingan penasihat hukum di persidangan dalam perkara pidana. Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ini adalah jenis penelitian yuridis normative. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis yang cermat, menyeluruh, dan sistematis terhadap karakteristik perilaku individu atau kelompok. Pendampingan hukum oleh penasihat hukum merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi dalam setiap proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ironisnya, hegemoni kajian-kajian ilmiah lebih mengarah kepada ketertundukan dan kepatuhan warga negara terhadap hukum dibandingkan ketertundukan dan kepatuhan penegak hukum itu sendiri terhadap hukum. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia ditegakkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Tersangka, Hukum, Keadilan, Peradilan

ABSTRACT

LEGAL COUNSEL ASSISTANCE IN COURT PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES

Rakhbir Singh (2310623054), Supardi, Handoyo Prasetyo

The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does not differentiate between ethnic groups or nationalities, ensuring that all individuals are treated equally before the court, whether in the District Court, High Court, or Supreme Court. Suspects or defendants are no longer viewed as "objects" but as "subjects" who possess rights and obligations, including the right to claim compensation or rehabilitation in cases of wrongful arrest, detention, prosecution, or legal judgment. The reality that many suspects/defendants are not accompanied by legal counsel during criminal proceedings raises significant questions about why the provisions of KUHAP are not adhered to. This thesis aims to analyze and elaborate on the regulations within KUHAP concerning the obligation of legal counsel to assist suspects/defendants in court proceedings and to analyze and elaborate on the rules that should govern the implementation of the obligation for legal counsel in criminal cases. The type of legal research employed in this work is normative legal research. This research is prescriptive in nature, aiming to provide a careful, comprehensive, and systematic description and analysis of the characteristics of individual or group behavior. Legal assistance by counsel is a fundamental right that must be fulfilled in every legal process, as stipulated in Article 56 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Ironically, the hegemony of scientific studies tends to focus more on the subordination and compliance of citizens to the law rather than the subordination and compliance of law enforcement officials to the law itself. This obligation not only aims to protect the rights of suspects but also to ensure that the principles of justice and the protection of human rights are upheld within the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Suspect, Law, Justice, Judiciary*